

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN NATAR

Siti Khoirina<sup>1</sup>, Andri Eka Yunindra<sup>2</sup>, Shinta Merinda WA<sup>3</sup> Yusranda<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia

Email : [sitikhoirina@umitra.ac.id](mailto:sitikhoirina@umitra.ac.id)<sup>1</sup>, [andriekay@umitra.ac.id](mailto:andriekay@umitra.ac.id)<sup>2</sup>, [Sintamerindaananda@umitra.ac.id](mailto:Sintamerindaananda@umitra.ac.id)<sup>3</sup>, [yusranda.student@umitra.ac.id](mailto:yusranda.student@umitra.ac.id)

### Abstract

*This research aims to determine the implementation of the Financial Management Information System Application (SIMDA) in the Natar District Regional Government. The method used in this research is qualitative analysis in the form of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The general research results show that employees in the Natar District regional government have understood the meaning of managing the Financial SIMDA application and the supporting factors that the Natar District regional government has in implementing Financial SIMDA have run optimally and the quality of information produced from implementing Financial SIMDA is considered sufficient. good, but there are network problems in operating the SIMDA Finance application so it can interfere with employee work when inputting data*

**Keywords:** Management Information System Application (SIMDA)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kecamatan Natar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian secara umum pegawai pada pemerintah daerah Kecamatan Natar telah memahami makna tentang pengelolaan aplikasi SIMDA Keuangan dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kecamatan Natar dalam menerapkan SIMDA Keuangan sudah berjalan secara optimal serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan dianggap sudah cukup baik, namun terdapat kendala jaringan dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan sehingga dapat mengganggu pekerjaan pegawai pada saat melakukan penginputan data.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi Manajemen (SIMDA)

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar mempermudah proses pengelolaan data

keuangan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu, pengendalian terhadap aplikasi ini menjadi suatu keharusan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai suatu sistem data yang dibentuk, dibesarkan serta digunakan untuk melaksanakan proses penataan APBD berbasis kerja. BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengembalian amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sebelum tahun 2017 proses pengelolaan dokumen laporan keuangan pada pemerintah daerah Kecamatan Natar belum menggunakan sistem informasi dan masih bersifat manual sehingga dalam proses penyusunan dokumen laporan keuangan menjadi tidak efektif dan efisien (memakan waktu dan tenaga), sering terjadi ketidakselarasan antar dokumen laporan keuangan (belum terintegrasi) serta tidak transparan dan subjektif. Sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka pada tahun 2017 hingga saat ini pemerintah daerah Kecamatan Natar telah bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan sistem informasi pada proses pengelolaan dokumen laporan keuangan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA Keuangan dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila didukung akses jaringan internet, fenomena yang diamati oleh peneliti pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Natar yang mewawancarai Bendahara Pengeluaran sekaligus operator SIMDA Keuangan yaitu Bapak Agus Ma'arif, S.A.P mengatakan bahwa SIMDA Keuangan sudah diterapkan sejak tahun 2017 menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 yang mengalami beberapa perubahan (updet) ke versi 2.9 yang digunakan hingga saat ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam mengaplikasikan SIMDA Keuangan yaitu pada gangguan koneksi jaringan internet sehingga menyebabkan proses penginputan data menjadi tertunda dan rentan mengakibatkan kesalahan dalam menginput data (wawancara, 28 Agustus 2023).

Menurut Hasibuan (2013) menyatakan bahwa "Sistem informasi manajemen adalah pendekatan-pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan yang piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat pimpinan".

Menurut Dewi (2019) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA menurut BPKP (2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerjasama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan Webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;

- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan E-Government; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan Good Government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi, menurut BPKP (2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
- b. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu proses interview (wawancara), observasi dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Informasi Yang Dibutuhkan	Sumber	Tema Yang Ditemukan
Sistem yang berbasis komputerisasi untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan	Wawancara dan Observasi	Pemahaman Makna SIMDA Keuangan
Membantu dalam sisi pelaporan dan memperbaiki sistem pengolahan data keuangan Pemerintahan	Wawancara dan Observasi	Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan
Mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD		
Terdapat 3 laporan yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan yaitu RKA, DPA dan SP2D	Wawancara dan Observasi	Output Yang Dihasilkan
RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan		
DPA memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan		
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana		

Sumber : *Data diolah oleh penulis, 2023*

### 1. Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada Kantor Kecamatan Natar telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan.

Menurut George C. Edward (2011) "sebuah implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu". Setiap pegawai yang memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan keuangan merasakan manfaat yang sama dari penerapan SIMDA Keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Natar. Manfaat penerapan SIMDA ini tergambar dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai Kecamatan Natar yang menunjukkan bahwa SIMDA Keuangan mempermudah dalam proses pengolahan data keuangan, dimana pegawai hanya bertugas untuk menginput data kemudian akan terproses secara otomatis. Hal ini membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah serta dapat mengefektifkan waktu penyusunan laporan keuangan. Selain pemahaman pegawai mengenai manfaat dan tujuan dari penerapannya, untuk

menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai SIMDA Keuangan, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIMDA Keuangan serta output yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun output yang dimaksud dari proses pengolahan data pada SIMDA Keuangan merupakan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh membuktikan bahwa pegawai Kecamatan Natar telah memahami proses pelaksanaan SIMDA Keuangan yang berkaitan dengan input dan output data yang dihasilkan. Hal tersebut menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai makna dan proses pelaksanaan SIMDA keuangan secara umum.

#### Analisis Data Faktor-Faktor Pendukung SIMDA Keuangan

Informasi Yang Dihasilkan	Sumber	Tema Yang Ditemukan
Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu	Wawancara dan Observasi	Komunikasi
Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan secara bertahap		
Adanya pelatihan khusus atau diklat SIMDA Keuangan yang diadakan oleh BPKP	Wawancara dan Observasi	Sumber Daya Manusia
Peningkatan SDM melalui diskusi/tukar pikiran dengan kepala kantor atau sesama pegawai		
Setiap tahun dilakukan sosialisasi untuk menambah pemahaman Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD)		
Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan	Wawancara dan Observasi	Disposisi/Sikap
Sangat membantu dalam proses transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu		
Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga kegagalan sistem dapat diminimalisir	Wawancara dan Observasi	Struktur Birokrasi

Sumber : *Data diolah oleh penulis, 2023*

#### 2. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki kantor Kecamatan Natar dalam penerapan SIMDA Keuangan

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Natar tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada Kantor Kecamatan Natar adalah sebagai berikut :

##### a. Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada Kantor Kecamatan Natar didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif, baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.

##### b. Sumber Daya Manusia

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh Kecamatan Natar guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumberdaya manusia yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat George

C. Edward III (2011), menurutnya keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, oleh karena itu jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa ternyata dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Kantor Kecamatan Natar didukung oleh beberapa faktor dalam hal sumberdaya manusianya, yaitu :

- 1) Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya;
- 2) Untuk penerapan SIMDA Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya;
- 3) Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan aplikasi SIMDA Keuangan antar pegawai serta kordinasi yang baik.

c. Disposisi/Sikap

Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di Kantor Kecamatan Natar cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan polapola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada Kantor Kecamatan Natar sudah cukup baik, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang sistemnya tidak pernah bermasalah dan terkendala oleh jaringan internet saja pada saat mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan.

Analisis Data Kualitas Informasi SIMDA Keuangan

Informasi Yang Dihasilkan	Sumber	Tema Yang Ditemukan
Informasi yang dihasilkan dapat diandalkan	Wawancara dan Observasi	Andal
Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai deadline yang telah ditentukan	Wawancara dan Observasi	Ketepatan Waktu
Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem	Wawancara dan Observasi	Relevan
Setiap menu aplikasi yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan		

Sumber : *Data diolah oleh penulis, 2023*

3. Kualitas Informasi SIMDA Keuangan

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika ouput yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada Kantor Kecamatan

Natar, ditemukan beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

- 1) Ketepatan waktu
- 2) Andal
- 3) Relevan

#### 4. KESIMPULAN

1. Secara umum pegawai pada pemerintah daerah Kecamatan Natar telah memahami makna tentang pengelolaan aplikasi SIMDA Keuangan dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kecamatan Natar dalam menerapkan SIMDA Keuangan sudah berjalan secara optimal serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan dianggap sudah cukup baik.
2. Terdapat kendala jaringan dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan sehingga dapat mengganggu pekerjaan pegawai pada saat melakukan penginputan data.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Wulandari. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8361/793>, diakses pada tanggal : 08 September 2023

George C. Edward III. Subarsono. 2011. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoko, T. Hani, (2012), Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu. SP, (2013), Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Mcleod, Raymod. (2020). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Roslina, F. Nova (2017). Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. E-Journal Akuntansi. Halaman 2.

Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. SIMDA dan Penerapannya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/sakd/333/Versi2.1.bpkp>, diakses pada tanggal : 28 Agustus 2023

Stoner, James. AF. dkk, (2012). Manajemen. Jakarta: Indek Gramedia Grup.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D. Penerbit: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia